

Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado

Analysis Of Financial Performance Of Kota Manado Regional Research And Development Planning Agency

Goudy Fergie Waworundeng¹, Heince R. N Wokas², dan I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : goudyfergie4@gmail.com¹, heince_wokas@yahoo.com², baliagung@unsrat.ac.id³

Abstrak: Pengukuran kinerja sangat berarti dalam memperkirakan akuntabilitas suatu organisasi dalam menciptakan kinerja yang maksimal. Implementasi analisis *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja keuangan sektor publik, serta dapat meningkatkan pelayanan mutu yang diberikan tepat sasaran. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado menggunakan konsep *value for money* dari segi ekonomis, efisiensi dan efektif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hal yang baik Dan sudah terealisasi seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan konsep *valuefor money* dari segi ekonomis, efisiensi dan efektif.

Kata kunci: Kinerja Kuangan, *Value For Money*.

Abstract: Performance measurement is very meaningful in reflecting the accountability of an organization in creating maximum performance. The implementation of value for money analysis is believed to be able to improve the accountability of public sector financial performance, as well as improve the quality of services provided on target. The aim of this research is to determine and analyze the financial performance of the Manado City Regional Research and Development Planning Agency using the concept of value for money from the economic field , efficiency and effectiveness. The type of research used is descriptive qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the financial performance that has been implemented by BAPELITBANGDA, Manado City, North Sulawesi Province shows good results and all activities carried out have been realized using the concept of value for money in terms of economics, efficiency and effectiveness.

Keyword : *Financial Performance, Value For Money*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mahsun (2013:20) menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik bisa dilihat dalam tiga hal yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Tranparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi ialah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung lewat lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada pertanggung jawaban atas segala aktivitas yang di lakukan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya organisasi sektor publik kerap kali dianggap kurang produktif, maksimal, serta memiliki kinerja yang rendah dan sumber pemborosan dana, terdapat tuntutan dari masyarakat ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar menghasilkan *good governance*. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus bekerjasama dalam melakukan pengawasan untuk pemantauan program-program instansi terkait untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program bukan hanya dilihat dari hasil yang dicapai melainkan proses serta dampak yang nantinya ditimbulkan. Pengelolaan sumber daya suatu daerah dalam pencapaian realisasi dengan target perencanaan yang strategis. Dengan

Diterima: 06-09-2024; Disetujui untuk Publikasi: 19-09-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

melakukan program secara terstruktur sesuai target dapat memudahkan instansi untuk mencapai keberhasilan.

Mahmudi (2017:6) mengemukakan kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan baik jika mampu merealisasikan rencana anggaran dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan dengan berpedoman pada standar pada tahapan ekonomis, efisien dan efektif. Dengan pemantauan terhadap kinerja instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang semakin berkualitas dalam mencapai standar mutu pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu instansi dalam melakukan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas suatu instansi merupakan tanggungjawab yang harus dilaporkan secara tertulis setiap tahunnya sehingga dapat menilai segala program ataupun anggaran yang telah dikerjakan. Edowai (2021:21) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang untuk memberikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang relevan dan terpercaya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan informasi atas kegiatan dan laporan keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan pembangunan yang diorientasikan padapencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan program-program yang telah direncanakan merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja sangat berarti dalam memperkirakan akuntabilitas sesuatu organisasi dalam menciptakan kinerja yang maksimal. Dilakukannya pengukuran kinerja untuk memenuhi tiga maksud yakni untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi, selanjutnya sebagai pembuat keputusan dan yang terakhir untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki organisasi kelembagaan. Salah satu cara dalam penilaian kinerja dapat digunakan dengan cara menggunakan konsep *value for money* (VfM) yaitu melakukan pengukuran / penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektifitas, serta rasio ekonomis. Mardiasmo (2019) mengungkapkan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga tingkat utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. *Value for money* tidak dapat lepas dari tiga tingkat utamanya yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas yang masing-masing tingkat memiliki kontribusi untuk menilai kinerja keuangan, bahkan *value for money* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam anggaran kinerja yang tertata dengan baik. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik.

Adanya 4 program utama yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembang Daerah Kota Manado, didalamnya terdapat beberapa kegiatan dengan tujuan terselenggaranya layanan pendidikan mewujudkan masyarakat cerdas komprehensif yang mandiri, berdaya saing, berbudaya dan sejahtera. Dari total anggaran Rp.6.375.645.745 yang direncanakan terealisasi sebesar 6.80.875.041 atau mencapai 95,37% dapat dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan program sudah baik namun masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi terutama dalam program yang telah dianggarkan namun tidak terealisasi yaitu program perencanaan perangkat daerah. Sehingga penetapan program terkesan lambat dikarenakan adanya pandemic *covid-19* yang mengharuskan membatasi aktivitas berkerumun. Penilaian kinerja diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap instansi ataupun pegawai didalamnya untuk meningkatkan kinerja secara terstruktur.

Dalam menilai kinerja digunakan metod *value for money* yaitu melakukan pengukuran/penilaian suatu kinerja dengan rasio ekonomis, efektifitas serta efisiensi. Sejalan dengan penelitian ini konsep *value for money* penting diterapkan dalam menilai ekonomis, efektifitas serta efisiensi kinerja instansi sektor publik. Dalam memberikan nilai pada masyarakat. *Value for money* bukanlah suatu metode penilaian kinerja yang baru, bahkan metode ini sudah sangat sering digunakan pada banyak penelitian yang mengukur kinerja sektor publik. Implementasi analisis *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja keuangan sektor publik, serta dapat meningkatkan pelayanan mutu yang diberikan tepat sasaran. Berkaitan dengan pengukuran kinerja, khususnya pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. *Value for money* dalam konteks instansi pemerintah merupakan jembatan menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang baik diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya publik dengan dasar yang hemat biaya. Pentingnya penilaian kinerja dengan menggunakan *value for money* menjadi bentuk pertanggungjawaban anggaran yang telah diberikan dalam bentuk laporan. Sejalan dengan *value for money* untuk memberikan manfaat pada masyarakat lewat instansi sektor publik.

Dinas Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado salah satu instansi pemerintah yang dinaungi oleh pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam memberikan informasi dalam bentuk laporan aktivitas dan kinerja keuangan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan serta mutu pelayanan sektor publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Kinerja**

Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado”.

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. Dapat didefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Pramudiana (2018:23) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Dariana (2019) mengemukakan laporan keuangan sektor publik menggambarkan status keuangan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Penyusunan laporan keuangan dilakukan bertujuan menghasilkan laporan keuangan untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan bertujuan untuk penyajian informasi berkaitan dengan neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang digunakan oleh manajemen dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya (PP No.71 Tahun 2010).

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan sesuai dengan paragraf 9 PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan adalah “menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Value for Money

Ende (2020), menggambarkan *value for money* adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Novi Budiarmo, Stanley Walandow (2022) yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinilai dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagian besar menunjukkan keberhasilan pada pelaksanaan program pembiayaan kesehatan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulitiawati Rusmidarti (2021) yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU Dengan Hasil analisis kriteria ekonomi menunjukkan kategori 90-100% yang artinya dalam pengelolaan anggaran pemerintah kriteria efisiensi dikategorikan kurang efisien yaitu hasil perhitungan lebih dari 90%, sedangkan kriteria efektif kriteria telah terealisasi secara optimal karena hasil perhitungan rasio berada diantara 100%.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina, dkk (2023) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tegal Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021 menunjukkan hasil ekonomis dengan rata-rata rasio ekonomis yaitu sebesar 92,30%. Dari segi efisiensi pada tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 201%.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian tentang kinerja keuangan Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado menggunakan konsep *Value for Money*

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian tentang kinerja keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado menggunakan konsep *Value for Money*.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah organisasi, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, serta tugas pokok dan fungsi organisasi. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara dan data laporan kinerja instansi pemerintah 2023

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab dengan informan yang ada di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado sehingga memperoleh jawaban yang jelas untuk permasalahan penelitian.

2. Pengamatan

Pengamatan/*Observasi*, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara turun lapangan untuk mengetahui informasi mengenai Laporan Keuangan Yang Terdapat pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kota Manado.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2018:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu peneliti turun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado

Proses Analisis

Tahapan proses yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama mengumpulkan data-data, dokumen dan hasil wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini secara langsung dari Badan Perencanaan Penelitiandan Pengembangan Daerah KotaManado
2. Tahap kedua melakukan pengelompokan data penelitian seperti laporan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk dinilai dari segi ekonomis, efektifitas dan efisiensi.
3. Tahap ketiga peneliti melakukan analisis data data yang terkumpul dengan menggunakan metode *value for money* untuk menilai kinerja keuangan lewat ekonomis,efektifitas dan efisiensi.
4. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil penelitian kinerja keuangan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Laporan Kinerja BAPELITBANGDA Kota Manado

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan Pembangunan secara efisien, efektif dan responsif.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian Nindya C Tinangon menyatakan bahwa untuk penyusunan LAKIP sendiri dilaksanakan setelah tahun anggaran selesai. Pada tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Manado telah membuat penetapan kinerja. Pada penetapan kinerja tersebut ada 4 (empat) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh) sub kegiatan, total anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.375.645.745,-. Total anggaran untuk Bapelitbangda Kota Manado pada tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp6.375.645.745 dimana terealisasi sebesar Rp6.080.875.041 atau mencapai 95,37%.

Pembahasan

RasioEkonomis

Menurut Andriani (2019), dalam pengelolaan keuangan, tingkat ekonomi didefinisikan sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomi anggaran dapat diukur dengan membandingkan presentase tingkat pencapaian dengan anggaran belanja.

Menurut Mardiasmo(2019), menyatakan bahwa ekonomi adalah ketersediaan barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Sejauh mana pemerintah mengurangi sumber daya produksi sambil menghindari biaya yang tidak perlu memengaruhi ekonomi.

Setiap kegiatan yang dapat membatasi pengeluaran yang kurang penting dianggap ekonomis. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat (4) program utama, dengan dua belas (12) sub program dan, tujuh belas (17) kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Sulawesi Utara. Dengan realisasi penggunaan dana terbesar pada program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 97,33%.

Menurut (Mahsun2019) dijelaskan bahwa tingkat ekonomis dikategorikan dalam 3 kategori yakni. Jika pengukuran ekonomis dibawah 100% maka dapat dikatakan kinerja tersebut ekonomis selanjutnya jika kegiatan tersebut diperoleh sama dengan 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan ekonomis berimbang dan terakhir bila kegiatan tersebut diperoleh diatas 100% maka kegiatan tersebut dikatakan tidak ekonomis.

RasioEfisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sedikit. Instansi sektor publik dapat dikatakan efisien apabila suatu program kegiatan apabila menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Pengertian *ouput* adalah hasil, tujuan, kebijakan atau target yang akan dicapai oleh organisasi dari suatu program kegiatan. Dalam hal ini yang menjadi input dari BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yaitu presentase hasil yang terdapat dari suatu aktivitas

BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat (4) program utama, dengan dua belas (12) sub program dan, tujuh belas (17) kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi terbesar terdapat pada program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mahsun 2019 menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dapat dikategorikan dalam 3 kategori yang pertama jika pengukuran efisiensi mendapatkan nilai dibawah 100% maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan yang kedua jika kegiatan tersebut dinilai dan mendapatkan hasil sama dengan 100% maka kegiatan tersebut dikatakan efisien berimbang dan yang terakhir jika kegiatan mendapatkan nilai lebih dari 100% maka kegiatan tersebut dikatakan tidak efisien.

Rasio Efektifitas

Pengukuran rasio efektifitas dikatakan efektif ketika program atau kegiatan yang dibuat dalam suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pengukuran rasio efektifitas dapat dibandingkan antara *outcome* dan *output*. Maksud dari pengukuran efektifitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuannya. *Outcome* ialah dampak yang diperoleh dari suatu program kegiatan. *Outcome* pada BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara adalah bagaimana hasil capaian dari kegiatan-kegiatan yang ditetapkan telah terlaksanakan dengan baik serta sudah mencapai dengan tujuan yang diharapkan.

Output yakni hasil yang telah dicapai dari suatu program kegiatan atau aktivitas dan kebijakan. Jika dikaitkan dalam BAPELITBANGDA Kota Manado provinsi Sulawesi Utara *output* merupakan hasil yang diperoleh dari suatu program kegiatan atau hasil kinerja dari realisasi fisik. Hasil dari laporan realisasi fisik sendiri bisa dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LAKIP) BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat (4) program utama, dengan duabelas (12) sub program dan, tujuh belas (17) kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, kriteria tingkat efisiensi ialah sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efektifitas.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektifitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efektifitas.

Berdasarkan hasil pembahasan analisis *Value for Money* rasio efektifitas BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan 17 kegiatan 100% dari kegiatan tersebut telah efektif. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah dilakukan BAPELITBANGDA Kota Manado Dinas Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi syarat *Value for Money* lewat elemen efektifitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan Dari Hasil penelitian yang di simpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ekonomi pada BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara memiliki sudah ekonomis, terdapat empat (4) program utama, dengan dua belas (12) sub program dan, tujuh belas (17) kegiatan yang sudah sudah berjalan dengan baik berdasarkan pada pengukuran elemen ekonomis dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Sulawesi Utara. Dengan realisasi penggunaan dana terbesar pada program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 97,33%.
2. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, sudah efisien karena kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hal yang baik dan sudah terealisasi seluruh kegiatan yang dilakukan
3. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efektifitas kinerja BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif, dengan presentasi 100% atau seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan efektif. Dengan demikian BAPELITBANGDA Kota Manado Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu mencapai tujuan yang diharapkan lewat tiap-tiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saranyang dapat dijadikan pertimbangan atau saran bagi BAPELITBANGDA Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

1. Diharapkan dapat mampumempertahankan kinerja keuangan setiap tahun, sehingga dapat meningkatkan program kegiatan dan mampu mencapai tujuan setrta sasaran yang diharpkan dan dapat meningkatkan nilai nilai ekonomis, efektifitas, serta efisiensi.
2. Diharapkan lebih memperhatikan proses penilaian kinerja karyawan semaksimal mungkin, agar penilaian kinerja tidak dianggap sebuah kebijakan yang memberatkan karyawan.
3. Diharapkan para pemimpin harus mengetahui kemampuan karyaan
4. Diharapkan agar penelitian inidapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik dan pembahasan ini yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk melakukan penelitian lanjutan.

Daftar Pustaka

- Andriani, S. (2019). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *ELMUHASABA : Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 3(1).
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77-105.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pusaka Almaida.
- Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mahmudi. 2017. Manajemen Kinerja Sektor Publik. STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2013). "Pengukuran Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pramudiana. Y. 2018. Sistem Akuntansi Publik. Edisi 3. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.(2014). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (2004). Jakarta.